

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu parameter untuk mengatakan bahwa pembangunan di sebuah negara atau daerah berhasil, baik pertumbuhan secara menyeluruh maupun pertumbuhan sektoral. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai bahan untuk melihat keberhasilan dan perkembangan perekonomian antar periode (Raharjo, 2006). Dalam mencapai pertumbuhan tersebut baik dalam struktur ekonomi kapitalis maupun sosialis, pemerintah mempunyai fungsi dan peran vital di dalam perekonomian terutama di era perekonomian modern saat ini. Pemerintah berperan dalam menjamin pengalokasian unsur-unsur sumber ekonomi secara efisien. Terutama pemerintah menjamin pengalokasian barang dan jasa yang tidak dihasilkan oleh sistem pasar. Peranan lainnya dari pemerintah dalam perekonomian yakni sebagai alat distribusi pendapatan dan kekayaan, serta sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian dari kemungkinan terjadinya guncangan yang timbul dalam perekonomian (Mangkoesoebroto, 2018).

Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang yang dihadapi negara atau daerah. Baik negara maupun daerah, dituntut untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang bertambah dengan penambahan jumlah dari peningkatan kualitas faktor-faktor produksi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Sehingga pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam perekonomian baik pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah harus mampu menjalankan fungsi ini. Terutama pemerintah di tingkat daerah sebagai penyelenggara dan penggerak pemerintahan di tingkat daerah merupakan bagian dari sub sistem negara sebagai upaya dalam peningkatan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan pelayanan masyarakat harus mampu menjalankan tanggung jawab dalam mencapai pertumbuhan ekonomi (Lebang et al., 2019).

Peran pemerintah daerah semakin sentral dengan adanya hubungan yang integral antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional dengan prinsip otonomi daerah yang diatur di dalam UU No.32 tahun 2004 tentang otonomi

daerah dengan tujuan untuk peningkatan demokrasi dan kinerja daerah. Pemimpin daerah selaku pemegang kewenangan dari pelaksanaan pemerintahan di daerah harus dijalankan berdasarkan kepentingan masyarakat dengan prinsip transparansi, peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Aminah, 2017).

Namun untuk menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pemerintahan suatu negara maupun daerah mempunyai masalah dalam hal pembentukan anggaran yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan struktur jangka panjang antara pengeluaran dan penerimaan yang mereka butuhkan. Banyak dari pemerintah negara maupun daerah mengantisipasi hal tersebut dengan memotong pengeluaran yang sudah mereka rencanakan atau dengan menaikkan pajak yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pusat maupun lokal (Miller & Russek, 1997). Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sebagai pengelola pemerintahan di daerah dalam menjalankan tugasnya, membutuhkan pembiayaan untuk membiayai pengeluarannya. Sehingga pemerintah daerah harus memahami darimana anggaran yang menjadi sumber keuangan daerah diperoleh.

Anggaran dapat diartikan sebagai satu instrumen perencanaan mengenai penerimaan dan pengeluaran pada periode yang akan datang yang secara umum direncanakan dan disusun untuk periode satu tahun (Suparmoko, 2002). Anggaran pada dasarnya merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi (Yasin et al., 2017). Sebagai suatu kebijakan, anggaran bertujuan untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi dengan menjamin keseimbangan antara per pajakan dan pengeluaran yang sejalan dengan pertumbuhan yang berkelanjutan (Ocran, 2011). Selain itu anggaran dapat dipakai sebagai instrumen dalam mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap baik atau tidaknya penerimaan dan pengeluaran pada periode berikutnya. Sehingga seberapa cocok tanggung jawab perpajakan atau pendapatan dan pengeluaran sebagai ukuran struktur fiskal, menentukan dalam melihat pengaruh yang ditimbulkan melalui sistem fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (Campbell, 2008).

Oleh sebab itu pemerintah daerah mesti mampu mengelola penerimaan daerah dan segala aspek yang dimiliki daerah untuk menggerakkan dan meningkatkan gairah perekonomian masyarakatnya, yakni diwujudkan dengan

efektif dan efisiensi biaya atau belanja yang dikeluarkan pemegang kekuasaan kabupaten dan kota yang dalam hal ini merupakan pemerintah kabupaten dan kota untuk tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Aminah, 2017).

Instrumen yang digunakan oleh suatu pemerintahan, baik pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah dalam mengelola anggaran adalah instrumen penerimaan dan pengeluaran. Hal ini termuat dalam suatu struktur fiskal yang merupakan komponen atau unsur-unsur berupa berbagai jenis pungutan pajak dan pungutan lainnya yang menjadi sumber penerimaan serta komponen yang menjadi variabel pengeluaran pemerintah. Komponen atau unsur-unsur fiskal pemerintah daerah tersebut terdapat dan disusun dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di dalamnya termuat sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta sumber-sumber yang menjadi pengeluaran pemerintah daerah dalam suatu periode keuangan yang biasanya untuk periode satu tahun (Azharsyah, 2011).

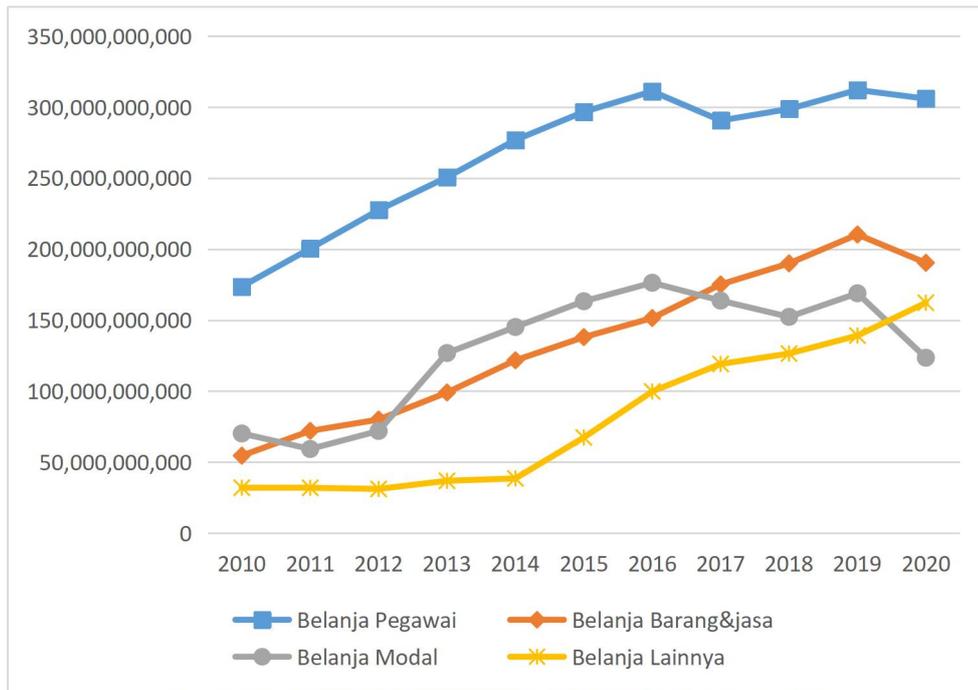
Dari sisi penerimaan, sumber pembiayaan (pendapatan) pemerintah daerah berdasarkan pihak yang berkontribusi terhadap penerimaan daerah dapat dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, pendapatan yang bersumber dari pihak luar yakni pihak yang berada di luar pemerintah daerah tersebut dan bukan penduduk daerah yang bersangkutan. Serta pendapatan ini tidak secara langsung di tangani oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Kedua, pendapatan yang bersumber dari pendapatan yang terdapat dalam yurisdiksi pemerintahan daerah yang bersangkutan. Jenis pendapatan yang termasuk ke dalam kategori ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil-hasil badan usaha yang dimiliki oleh daerah (Riduansyah, 2003).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 membagi sumber penerimaan daerah ke dalam empat kategori terdiri atas: 1.) Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, 2.) dana perimbangan, 3.) pinjaman daerah, 4.) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen selanjutnya dari struktur keuangan pemerintah daerah yakni dari sisi komponen atau unsur-unsur yang menjadi pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pemerintahan dapat dijadikan sebagai cerminan arah kebijakan dari

pemerintahan tersebut. Ketika pemerintah daerah menetapkan kebijakan dalam rangka membeli suatu barang dan jasa, ini menunjukkan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 2018).

Pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa teori dasar yakni teori makro dan teori mikro yang menjelaskan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah pada golongan teori makro terdapat beberapa model yang dikembangkan, salah satunya model pembangunan tentang perkembangan pemerintah yang dipelopori oleh Rostow dan Musgrave. Dalam model pembangunan yang dikemukakan dalam teorinya Rostow dan Musgrave menyatakan bahwa peran serta pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi merupakan saling terkait. Fase pembangunan ekonomi oleh Rostow dan Musgrave dapat dibagi kedalam tiga tahapan yakni fase awal, fase menengah, dan fase lanjut. Peran serta pemerintah dalam perekonomian sangat dibutuhkan pada fase awal karena pada periode ini pemerintah dituntut untuk menjamin tersedianya prasarana dasar, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, dan sebagainya. Sementara itu perkembangan pengeluaran pemerintah dalam teori mikro adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permintaan dan tersedianya barang publik (Mangkoesobroto, 2018).

Sama halnya dengan penerimaan pemerintah daerah, dari sisi pengeluaran pemerintah daerah dapat dikelompokkan kedalam dua kategori yakni, pengeluaran langsung serta pengeluaran tidak langsung (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2018). Pengeluaran pada belanja tidak langsung atau belanja administrasi umum adalah pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga pengeluaran atau belanja ini dapat dikategorikan kedalam biaya kebijakan. Sementara pengeluaran langsung adalah pengeluaran yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya kegiatan pemerintahan dengan baik dan semestinya (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2018). Sementara secara nasional unsur-unsur atau komponen pengeluaran pemerintah daerah dibagi kedalam empat komponen yakni belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya (BPS, 2020).



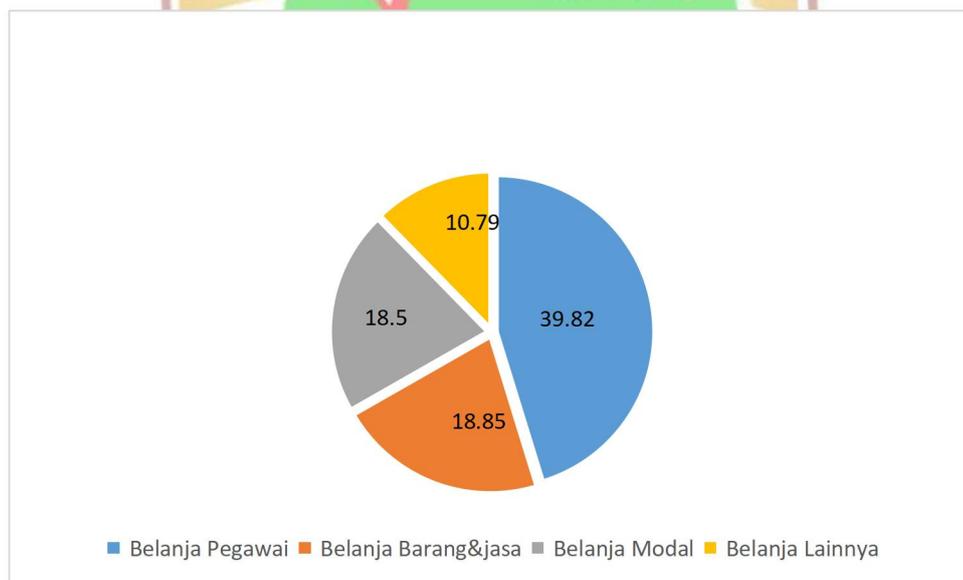
Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

**Gambar 1. 1** Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2010-2020

Kondisi pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota selama rentang waktu sepuluh tahun terakhir dapat terlihat pada gambar 1.1. Pada gambar 1.1 memperlihatkan pergerakan dari masing-masing komponen pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Selama jangka waktu 2010 sampai 2020, belanja barang dan jasa menjadi komponen pengeluaran yang cenderung mengalami tren kenaikan setiap tahunnya dengan angka tertinggi pada tahun 2019 sebesar 210,27 triliun rupiah. Terlihat bahwa belanja barang dan jasa mengalami fase kenaikan dari tahun 2010 sampai tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Belanja pegawai menunjukkan pergerakan yang cenderung meningkat pada periode tahun 2010 sampai tahun 2016 serta tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2017 dan tahun 2020 belanja pegawai mengalami pergerakan yang menurun. Belanja pegawai tertinggi yang dikeluarkan pemerintah kabupaten dan kota yakni pada tahun 2016 sebesar 311,11 triliun rupiah.

Pergerakan kurva belanja modal dari tahun 2010 sampai tahun 2020 cenderung fluktuatif dengan belanja modal terbesar terjadi di tahun 2016 yakni sebesar 176,31 triliun rupiah. Sementara pengeluaran pada belanja lainnya bergerak fluktuatif pada periode tahun 2010 sampai tahun 2014, dan cenderung bergerak naik di tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 merupakan besaran tertinggi untuk belanja lainnya selama periode tahun 2010 sampai tahun 2020 yakni sebesar 162,21 triliun rupiah disaat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal mengalami penurunan.

Jika dilihat dari porsi pengeluaran yang dibelanjakan oleh pemerintah kabupaten dan kota, pengeluaran untuk belanja pegawai menjadi komponen belanja yang mengambil porsi terbesar dari total belanja yang dibelanjakan. Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa belanja pegawai mengambil porsi belanja sebesar 39,82 persen dari total belanja jika di rata-ratakan pada periode tahun 2010-2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

**Gambar 1. 2** Struktur Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Indonesia Rata-rata Tahun 2010-2020

Belanja barang dan jasa serta belanja modal mengambil porsi pengeluaran yang hampir sama yakni masing-masing sebesar 18,85 persen dan 18,5 persen dari total pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota jika di rata-

ratakan selama periode tahun 2010 sampai tahun 2020. Belanja lainnya mengambil porsi terkecil dari total pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota yakni sebesar 10,79 persen.

**Tabel 1. 1**

Porsi Pengeluaran Pemerintah Kab/ Kota di Indonesia Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2010-2020

Tahun	Belanja pegawai		Belanja barang & jasa		Belanja modal		Belanja lainnya		Total
	Triliun rupiah	Persen	Triliun rupiah	Persen	Triliun rupiah	Persen	Triliun rupiah	Persen	
2010	173,65	52,6	54,54	16,5	70,16	21,2	31,97	9,7	330,32
2011	200,39	55,1	71,97	19,8	59,24	16,3	31,88	8,8	363,48
2012	227,49	55,4	79,97	19,5	71,94	17,5	31,11	7,6	410,51
2013	250,64	48,8	99,01	19,3	126,84	24,7	36,83	7,2	513,32
2014	276,85	47,6	121,68	20,9	145,14	24,9	38,49	6,6	582,16
2015	296,69	44,6	138,02	20,7	163,30	24,5	67,34	10,1	665,35
2016	311,11	42,1	151,47	20,5	176,31	23,9	99,75	13,5	738,64
2017	290,56	38,8	175,12	23,4	163,74	21,9	119,10	15,9	748,52
2018	298,70	38,9	189,97	24,8	152,29	19,8	126,44	16,5	767,40
2019	312,11	37,6	210,27	25,3	168,90	20,3	139,10	16,8	830,38
2020	305,98	39,1	190,35	24,3	123,51	15,8	162,21	20,7	782,05

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dapat dilihat pada table 1.1 mempertegas bagaimana kondisi pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota yang dijelaskan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2. Total pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota mengalami kenaikan setiap tahunnya. Belanja pegawai menjadi belanja dengan porsi terbesar setiap tahunnya. Meskipun mengalami kenaikan setiap tahunnya, jika dilihat dari porsinya belanja pegawai mengalami penurunan setiap tahunnya namun tetap menjadi belanja yang mengambil porsi terbesar dari total belanja yang dikeluarkan.

Fenomena pengeluaran untuk biaya pegawai mendominasi porsi pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota menarik untuk diteliti seberapa besar pengaruhnya kepada perekonomian yang dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pada pengeluaran untuk pegawai dapat berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat. Konsumsi secara teoretis adalah bagian dari pembentuk komponen nilai barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa konsumsi masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kenaikan pertumbuhan ekonomi (Fitri, 2019).

Belanja lainnya menjadi pengeluaran yang secara konsisten mengalami kenaikan selama periode tahun 2011 sampai tahun 2020 baik dari segi nilai maupun dari segi persinya dari total belanja tiap tahunnya. Pengeluaran untuk belanja lainnya tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 162,21 triliun atau sebesar 20,7 persen dari total belanja pada tahun 2020. Kebijakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota merupakan salah satu upaya dalam rangka berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional (Fitri, 2019). Namun dalam kenyataannya kebijakan anggaran yang selalu meningkat tiap tahunnya tidak diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten dan kota.

Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh (BPS, 2018) mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, ekonomi nasional mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen di tahun 2018. Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari Pulau Jawa yakni sebesar 58,48 persen dan pertumbuhan terbesar yakni di Pulau Sulawesi dengan pertumbuhan sebesar 6,65 persen. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dijelaskan pada tabel 1.2 yang memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2010 hingga tahun 2020.

**Tabel 1. 2**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peranan Wilayah/ Pulau di Indonesia Tahun 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan ekonomi nasional	Peranan Wilayah/ Pulau					
		Sumatera	Jawa	Kalimantan	Bali dan Nusa Tenggara	Sulawesi	Maluku dan Papua
2010	6,1	23,12	58,06	9,15	2,73	4,52	2,42
2011	6,5	23,56	57,59	9,55	2,56	4,61	2,13
2012	6,23	23,77	57,63	9,30	2,51	4,73	2,06
2013	5,78	23,81	57,99	8,67	2,53	4,82	2,14
2014	5,02	23,16	57,39	8,15	3,56	4,78	2,96
2015	4,79	22,21	58,29	8,15	3,06	5,92	2,37
2016	5,02	22,03	58,49	7,85	3,13	6,04	2,46
2017	5,07	21,66	58,49	8,20	3,11	6,11	2,43
2018	5,17	21,58	58,48	8,20	3,05	6,22	2,47
2019	5,02	21,32	59,00	8,05	3,06	6,33	2,24

2020	-2,07	21,36	58,75	7,94	2,94	6,66	2,35
------	-------	-------	-------	------	------	------	------

*Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tahun 2010 hingga tahun 2020 cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan berada di angka lebih dari lima persen, kecuali pada tahun 2015 dan tahun 2020 yang pertumbuhannya di bawah 5 persen yakni masing-masing sebesar 4,79 persen pada tahun 2015 dan mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi nasional tertinggi pada periode tahun 2010 hingga tahun 2020 terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 6,5 persen dan terendah pada tahun 2020 yakni sebesar -2,07 persen.

Struktur perekonomian Indonesia tahun 2010-2020 masih didominasi oleh peranan besar wilayah provinsi yang berada di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di atas angka 55 persen setiap tahunnya. Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang menyumbang kontribusi tertinggi setidaknya dari tahun 2010 hingga tahun 2013 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Pulau Sumatera menjadi wilayah dengan peranan tertinggi selanjutnya pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi di atas angka 20 persen setiap tahunnya. Dapat dikatakan jika hampir 80 persen dari sumber pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari dua wilayah ini. Kelompok provinsi yang berada di wilayah Kalimantan memiliki peranan kontribusi di angka sebesar 7 hingga 9 persen terhadap PDB di periode tahun 2010-2020. Selanjutnya diikuti oleh kelompok daerah di Pulau Sulawesi dengan rata-rata kontribusi di angka 4 hingga 6 persen, serta cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pulau Bali dan Nusa Tenggara serta Pulau Maluku dan Papua memberikan peranan kepada PDB di bawah 5 persen selama periode tahun 2010-2020.

Jika dilihat dari peranan pemerintah melalui pengeluaran konsumsi pemerintah dalam membentuk PDB seperti pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa nilai pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode waktu tahun 2010-2020. Sementara itu, distribusi Produk Domestik Bruto menurut pengeluaran, pengeluaran konsumsi pemerintah mengambil porsi dirataan 9 persen selama periode tahun 2010 hingga tahun 2020.

Nilai ini tentu masih di bawah dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengambil peranan lebih dari 50 persen selama periode tahun 2010-2020. Serta pembentukan modal tetap domestik bruto dengan nilai di atas 20 persen dari distribusi Produk Domestik Bruto menurut pengeluaran selama periode dari tahun 2010-2020.

Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/ kota, desa) untuk membeli barang dan jasa yang tujuannya untuk konsumsi akhir (BPS Kaltara, 2020). Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja sosial, dan belanja transfer dapat dikategorikan kedalam pengeluaran konsumsi pemerintah (kemenkeu, 2020).

**Tabel 1. 3**

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Besaran Distribusi nya dalam PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2020

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (triliun rupiah)	Distribusi (persen)
2010	618,2	9,01
2011	652,3	9,06
2012	681,8	9,25
2013	729,1	9,50
2014	736,3	9,42
2015	775,4	9,75
2016	774,3	9,45
2017	790,8	9,12
2018	828,9	9,02
2019	855,9	8,81
2020	872,6	9,29

Sumber: BPS Nasional (data diolah)

Apabila diperhatikan secara spesifik dengan mengambil contoh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, masih terdapat kabupaten dan kota dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,17 persen. Contohnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Bener Meriah, Nagan Raya, Pidie, Simeulue, dan Subulussalam yang pertumbuhannya berkisar pada angka 3,26 persen hingga 4,63 persen. Jadi dapat terlihat bahwa dalam fenomena pengeluaran pemerintah yang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya

baik di tingkat nasional maupun daerah, namun pada kenyataannya masih terdapat daerah yang pertumbuhan ekonominya masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang naik belum diikuti dengan pertumbuhan yang naik pula.

Banyak penelitian yang telah membahas mengenai pengaruh dari kebijakan pemerintah melalui pengeluaran mereka terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Helms dalam penelitiannya yang mengambil kasus di negara bagian Amerika Serikat menyatakan bahwa belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah yang didanai oleh pendapatan akan memiliki pengaruh yang positif ketika digunakan untuk mendanai pelayanan publik, seperti pendidikan, jalan raya, kesehatan dan keselamatan publik. Belanja pada sektor publik setidaknya dapat mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh peningkatan pajak untuk meningkatkan pendapatan (Helms, 2013).

Hampir sama dengan Helmes, Zegler menyatakan bahwa peningkatan pada pengeluaran publik biasanya mencakup pada penyediaan layanan sosial dan ekonomi dasar. Peningkatan investasi pada layanan dasar akan meningkatkan modal manusia yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Zagler & Dürnecker, 2003). Penelitian lain dengan mengambil kasus pada pengeluaran oleh pemerintah pusat di Indonesia yang dilakukan oleh (Cesarina et al., 2021) memberikan gambaran bahwa belanja pegawai menjadi belanja yang paling besar mengambil porsi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini hampir sama dengan kondisi yang terjadi di daerah, dimana dalam penelitian (Deswantoro, 2017) belanja pegawai menjadi belanja dengan porsi terbesar yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pemerintah pusat memberikan efek pada kenaikan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pengeluaran modal akan memberikan efek dengan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Cesarina et al., 2021). Hasil yang berbeda diperoleh dimana belanja pegawai dan belanja modal oleh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Deswantoro, 2017).

Maka berdasarkan uraian di atas masih terdapat perbedaan dalam arah hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, serta fenomena kenaikan pengeluaran pemerintah daerah yang tidak diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan suatu studi empiris mengenai pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan karakteristik komponen anggaran yang dipakai di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia periode 2011-2020.

Faktor-faktor yang menjadi bahan kajian bagi peneliti dalam penelitian ini adalah struktur fiskal dengan peneliti hanya berfokus pada komponen yang menjadi sumber pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota. Melihat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten dan kota dengan data yang digunakan berbentuk data panel, yakni gabungan data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* diambil dari 415 kabupaten dan kota di Indonesia dengan periode waktu selama sepuluh tahun yakni dari tahun 2011-2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi?
- b. Bagaimana dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh belanja modal?
- c. Bagaimana dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja barang dan jasa?
- d. Bagaimana dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja lainnya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Menganalisis dampak belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan pertumbuhan ekonomi.
3. Menganalisis dampak belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Menganalisis dampak belanja lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan mampu meningkatkan keterampilan bagi peneliti sendiri terutama dalam penggunaan alat kuantitatif dan diharapkan dapat menjadi perbandingan bagi penelitian serupa oleh peneliti lain di masa mendatang.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan terutama oleh pemangku kebijakan yakni pemerintah untuk membentuk strategi pembangunan yang akan diambil dalam upaya pemulihan dan peningkatan perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

